

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya pembangunan ekonomi ialah suatu cara atau tahapan dimana akan menuju keadaan yang makmur dan sejahtera. Cara atau tahapan yang dimaksud adalah peningkatan ekonomi rakyat, menambah hubungan ekonomi regional dan perpindahan dari sektor primer kepada tersier dalam kegiatan ekonomi (Nor, 2019).

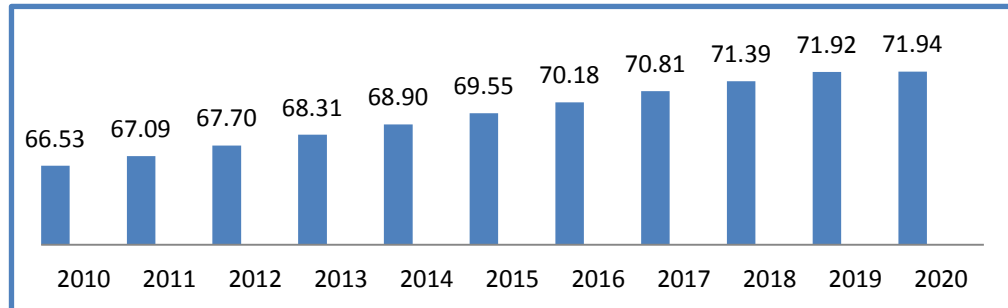
Hidup sejahtera merupakan cita – cita semua orang. Tapi tidak semua orang bisa mengalami kehidupan yang sukses. Sektor ekonomi merupakan salah satu cara dalam bidang pembangunan yang dapat dimanfaatkan suatu bangsa untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Menurut Adam Smith dalam(Ningrum et al, 2020), sumber daya manusia merupakan input yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi, yang merupakan penyebab kesejahteraan suatu bangsa, yaitu pentingnya skala ekonomi dan kualitas yang melekat pada manusia. Indeks Pembangunan Manusia dibangun atas tiga indikator, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Indikator kesehatan ditentukan oleh usia panjang atau tingkat harapan hidup. Sementara rata-rata melek huruf dan rata-rata lama sekolah digunakan untuk indikator pendidikan. Sedangkan indikator standar kehidupan layak ditentukan oleh pendapatan riil yang disesuaikan, yaitu kemampuan daya beli. Kemudian UNDP memperbarui pendekatan sebelumnya dengan pendekatan baru, mengganti

salah satu indikator angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah (Ningrum et al, 2020)

United Nation Development Programme (UNDP) mengembangkan dan mempopulerkan *Human Development Index* (HDI) dalam serangkaian publikasi tahunan "*Human Development Report*" mulai tahun 1996. Indeks ini dibuat sebagai alternatif untuk mengukur kemajuan suatu negara dalam upaya pengembangannya. IPM adalah indikator untuk mengukur aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM adalah indeks komposisi berdasarkan tiga indicator : standar hidup, tingkat pendidikan, dan kesehatan. Indikator kesehatan ditentukan oleh angka harapan hidup, sedangkan indikator pendidikan ditentukan oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan standar hidup diukur dengan pendapatan riil yang disesuaikan, yaitu kemampuan daya beli. Namun pada tahun 2010 UNDP memperbaiki metode lama dengan metode baru, dengan mengganti salah satu indikator yaitu angka melek huruf dengan lama sekolah yang diharapkan (Ningrum et al., 2020).

Berdasarkan hasil perhitungan (Badan Pusat Statistik, 2021) Menurut (Badan Pusat Statistik, 2021) indeks pembangunan manusia di Indonesia meningkat dari 2010 ke 2020. Hal ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Gambar 1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2010-2020



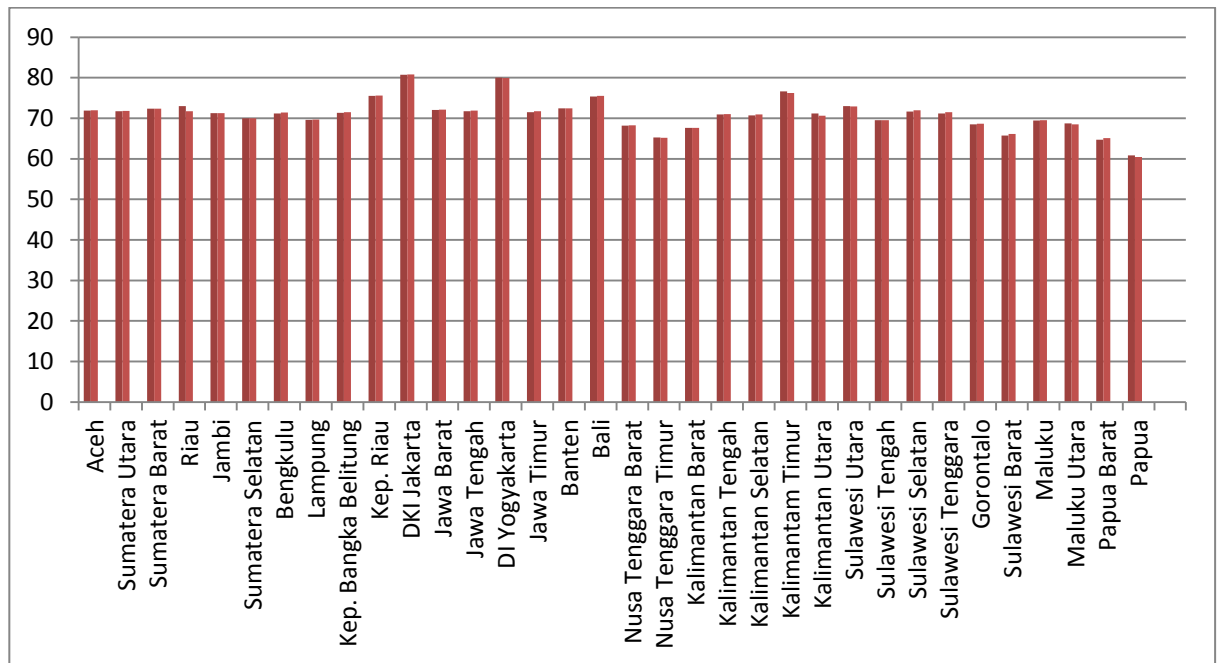
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2020

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan mulai dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,94 pada tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata – rata tumbuh sebesar 0,87 persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” sejak tahun 2016. Pandemi COVID-19 membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Indonesia. IPM taun 2020 tercatat sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya (*Badan Pusat Statistik, n.d.-a*)

Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terdiri dari empat (4) Kabupaten dan satu (1) Kota. Dibandingkan dengan level Indeks Pembangunan Manusia nasional, capaian Indeks Pembangunan Manusia provinsi D.I. Yogyakarta tercatat selalu lebih tinggi. IPM provinsi D.I. Yogyakarta selalu menempati peringkat kedua tertinggi

di antara 34 provinsi di Indonesia di bawah provinsi DKI Jakarta. hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2

Gambar 1.2
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi

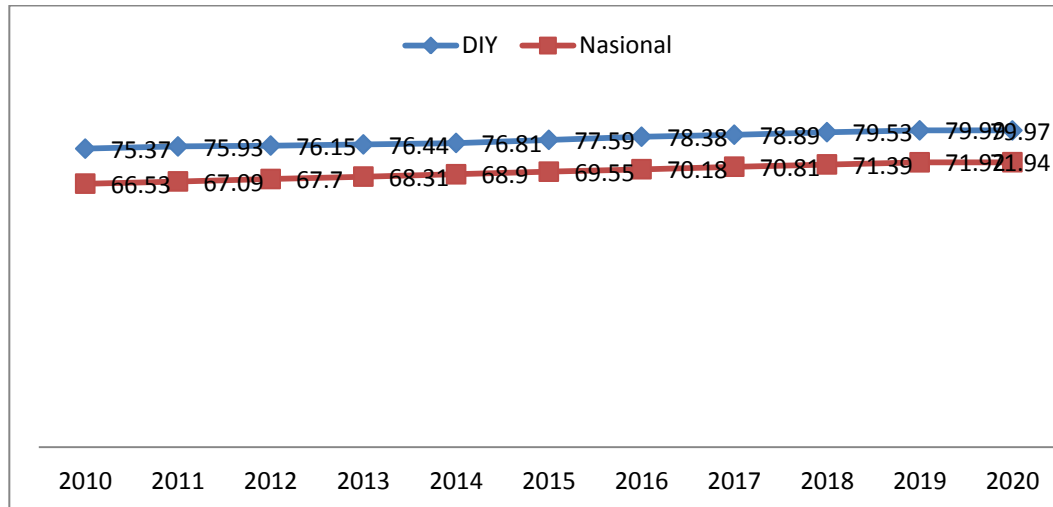


Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Dari tahun 2016 sampai tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi D.I. Yogyakarta terus mengalami peningkatan. IPM di provinsi D.I. Yogyakarta sampai tahun 2020 mencapai angka 79,97 yang masuk dalam kategori dengan “IPM Tinggi” ($70 < IPM < 80$). Level IPM 2020 sedikit mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai posisi 79,99. Penyebabnya adalah penurunan indeks pada dimensi standar hidup yang layak tidak mampu dikompensasi oleh kenaikan indeks pada kedua dimensi yang lain yakni kesehatan dan pengetahuan. Selama masa pandemi

Covid-19, daya beli penduduk menurun tajam sehingga pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan tercatat lebih rendah dari tahun 2019 (*BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, n.d.*).

Gambar 1.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) D.I. Yogyakarta, 2010-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi D.I. Yogyakarta 2020

Secara umum, IPM provinsi D.I. Yogyakarta terus mengalami kemajuan selama satu dekade terakhir. IPM provinsi D.I. Yogyakarta meningkat dari 75,37 pada tahun 2010 menjadi 79,97 pada tahun 2020 atau rata-rata tumbuh sebesar 0,59 persen setiap tahun. Perkembangan ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik (*BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, n.d.*)

Menurut Uskaliadanti dalam (Sinuraya, 2020) berbagai sarana dan prasarana dibutuhkan untuk mendorong kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan investasi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang produktif. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi indikator yang baik dari

arah kebijakan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, termasuk investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, yang diperkirakan akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Mengutip (Rangongo & Ngwakwe, 2019), dengan adanya pendidikan memungkinkan terciptanya ide-ide baru untuk produk, layanan dan teknologi baru. Tentu hal ini memerlukan kebijakan pemerintah yang agresif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, pendidikan saja tidak cukup, perlu juga ditunjang dengan kesehatan yang baik. Menjaga kesehatan yang baik sangat penting untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kedua hal tersebut saling berkaitan karena dibutuhkan fisik dan mental yang kuat untuk menghasilkan manusia yang cerdas (*men insano in corporesano*). Ketika tubuh bebas dari segala penyakit fisik atau mental dapat dikatakan tubuh dalam keadaan sehat. Tujuan dari kesehatan yang baik adalah untuk menjaga sistem kekebalan tubuh agar dapat mencegah penyakit kronis. Karena kedua komponen tersebut tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat, maka pemerintah harus mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat, hal ini dapat dilakukan dengan sentuhan anggaran kepada kedua elemen tersebut (Rahim et al, 2021).

Menurut Mangkoesobroto dalam (Ningrum et al., 2020), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah memperhitungkan pengeluaran yang diperlukan untuk dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka

melaksanakan kebijakan yang menyerukan pembelian barang dan jasa. Indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh belanja pemerintah dapat dilihat dari realisasi belanja pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.

Pemerintah daerah dapat berkontribusi terhadap peningkatan IPM dengan mengalokasikan dana pemerintah secara strategis. Pengeluaran pemerintah juga diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tujuan utama pembangunan daerah adalah di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di suatu daerah memberikan ringkasan alokasi anggaran yang diperlukan untuk mendukung elemen in (Maria, 2021).

Pertumbuhan ekonomi penting guna mempersiapkan perekonomian untuk menjalani tahapan kemajuan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, sumber daya harus digunakan secara efisien dan jumlah faktor yang berhubungan dengan pertumbuhan harus terus diusahakan. Indeks pembangunan manusia akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia karena meningkatkan kapasitas pertumbuhan suatu wilayah baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya.

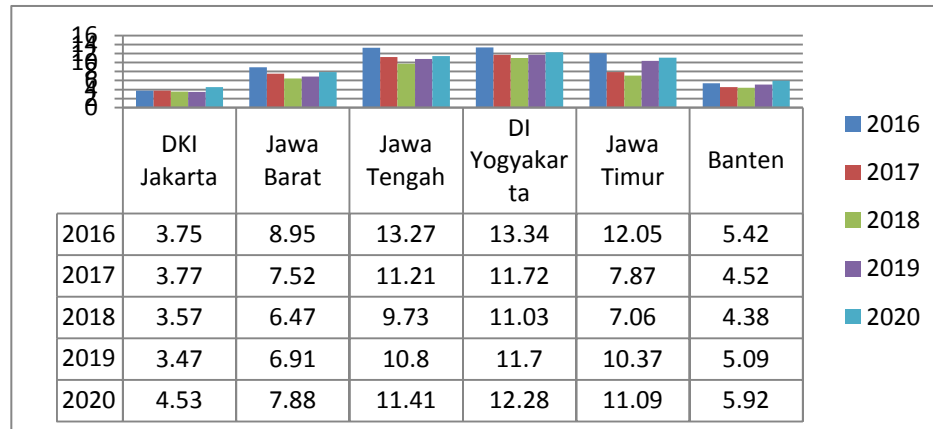
Besarnya angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua faktor lain yang dianggap penting dalam meningkatkan IPM. Tanda keberhasilan

pembangunan dilihat dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedangkan kualitas hidup merupakan faktor lain yang mencirikan kemiskinan dari segi kualitas hidup(Sinuraya, 2020).

Menurut Winarti dalam (Invantoro & Efriyenti, 2020) suatu bangsa dianggap maju jika memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Tingkat pertumbuhan, yang menghasilkan pendapatan minimum yang tidak proporsional dengan meningkatnya pengangguran, yang mencegah pendapatan dihasilkan, serta rendahnya tingkat pendidikan, dapat disalahkan atas meningkatnya tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kemiskinan karena merupakan masalah rumit yang dimulai dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang paling mendasar, yang mengakibatkan pengabaian kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Karena itu, ada kesenjangan pembangunan manusia yang signifikan antara keduanya, yang pada akhirnya mempengaruhi target pencapaian IPM.

Meskipun IPM provinsi D. I. Yogyakarta tinggi, tidak sejalan dengan percepatan peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan provinsi D.I. Yogyakarta tergolong tinggi menduduki peringkat pertama dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa, dapat dilihat tabel dibawah ini :

Gambar 1.4
Kemiskinan di Pulau Jawa



Sumber : (Badan Pusat Statistik, n.d.-b) (2020)

Berdasar gambar 1.2 indeks pembangunan manusia provinsi D.I. Yogyakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan menduduki peringkat kedua dengan IPM tertinggi diantara 34 provinsi dan masuk dalam kategori IPM tinggi. Tentu dengan adanya indeks pembangunan manusia yang semakin baik maka diharapkan juga bahwa tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Akan tetapi melihat data pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai 2020 kemiskinan di provinsi D.I. Yogyakarta menjadi nilai tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa, meskipun setiap tahun tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah indeks pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Begitu juga dengan variabel lainnya seperti apakah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D. I. Yogyakarta tergolong sangat tinggi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi serta pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan yang masih cenderung mengalami pergerakan naik turun dalam periode 2010-2021. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I.Yogyakarta ?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta ?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I.Yogyakarta ?
4. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya maka perlu diketahui bahwa dalam penelitian ini terdapat batasan seperti yang telah dijelaskan dalam tujuan ini. Sehingga Peneliti lebih fokus pada pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia yang ada di Provinsi D.I. Yogyakarta. Guna penelitian ini menjadi lebih terarah dan hasilnya dapat dimanfaatkan dengan semestinya.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu :

1. Bagi peneliti

Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu membantu peneliti dalam mendapatkan gelar S1 Ekonomi Pembangunan di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis

2. Bagi instansi pemerintah

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat membantu memberikan ide pikir bagi pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dalam meningkatkan IPM dan menyelesaikan persoalan kemiskinan

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan sumbangsih informasi bagi para mahasiswa yang lain di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timu